

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mempedomani dan membaca ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 27 ayat (1) menjelaskan : SKPD menyusun Renja-SKPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 137 ayat (1) SKPD menyusun renja-SKPD. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka SKPD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah menyusun dokumen perencanaan tahunan untuk menjadi pijakan/acuan pada tahun berikutnya (tahun N+1).

Penyusunan dokumen Renja-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang merupakan dokumen jangka pendek (selama 1 tahun) sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis kinerja dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018, dengan berprinsip pada kajian dan analisis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha yang berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang merupakan salah satu bagian integral dari Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan yang tangguh di daerah dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang tercermin dari implementasi kegiatan tahunan. Rumusan kebijakan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun



2018 merupakan upaya untuk mengakomodir isu-isu dan kebijakan strategis yang bersifat nasional, regional maupun lokal/daerah. Beberapa isu strategis dimaksud antara lain : (1) Pengentasan Kemiskinan, (2) Gizi kuran /gizi buruk, (3) Produktivitas pangan yang rendah, (4) Konversi lahan pertanian tanaman pangan, (5) Fluktuasi harga pangan, (6) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan gizi dan pangan yang cukup kualitas dan kuantitas, (7) Kualitas sumberdaya penyuluh yang masih rendah, (8) Kelembagaan penyuluh yang belum optimal diperdayakan, (9) Sistem penyuluhan yang belum optimal.

Implementasi terhadap program dan kegiatan sebagai upaya untuk mengelola isu dengan kemas pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan/peran serta masyarakat baik bersifat kelompok maupun perorangan. Hal tersebut telah dijabarkan dalam beberapa kegiatan diantaranya kegiatan yang mengarah pada pencegahan dan pengendalian terhadap konversi lahan pertanian sebagai akibat adanya alih fungsi lahan kepada penggunaan lainnya. Sejalan dengan Kota Bima sebagai Kota Agropolitan telah dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat karakteristik sebuah kota agropolitan yakni telah ditetapkannya lahan-lahan sawah produktif sebagai lahan pertanian pangan abadi (LPPA) yang telah di tetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 223 Tahun 2008 dan selanjutnya pada tahun 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyusunan peta melalui kegiatan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
 16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
 19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
 20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
 21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan,



Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Renstra-SKPD 5 (lima) Tahun ke dalam rencana Tahunan atau Renja sebagai pelaksanaan operasional;
- b. Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra-SKPD 5 (lima) Tahun ke dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja-SKPD);
- c. Menjadi pedoman penyusunan awal dalam menyusun dokumen RAK-SKPD tahun 2018;
- d. Salah satu Instrumen bagi SKPD untuk mengukur target capaian kinerja dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD dalam Satu Tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima terdiri dari dari empat bab dan beberapa lampiran. Renja SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RAKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara internal oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tahun lalu.

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD Kota Bima disajikan pada Tabel 2.1 berikutini.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kota Bima

Nama SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
1	WAJIB									
1 21	Ketahanan Pangan									
1 21 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 21 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1 21 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1 21 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1 21 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1 21 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%



1	21	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1	21	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1	21	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	11 bln	11 bln	100,00 %	11 bln	11 bln	100,00%
1	21	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1	21	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1	21	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	21	01	02	02	Pembangunan rumah dinas	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	-	-	-	-	-	-	-	-
1	21	01	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Sarana perlengkapan kantor yang memadai	-	2 unit	-	-	-	-	-	-
1	21	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	-	12 unit	-	-	-	-	-	-
1	21	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	3 jenis	1 pkt	4 Jenis	4 Jenis	100,00 %	-	-	-
1	21	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	1 pkt	1 pkt	-	-	-	1 pkt	1 pkt	100,00%
1	21	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	-	1 pkt	-	-	-	-	-	-
1	21	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	12 bln	1 pkt	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %	-	-	-
1	21	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	12 bln	-	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %	-	-	-
1	21	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	12 bln	-	-	-	-	-	-	-
1	21	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	12 bln	1 pkt	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %	12 bln	12 bln	100,00%
1	21	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
1	21	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas	1 Pkt	35 Orang	-	-	-	-	-	-



1	21	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	21	01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya SDM aparatur terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan	70 orang	80 orang	-	-	-	-	-	-
1	21	01	05	04	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-Undangan	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 orang	-	-	-	-	-	-	-
1	21	01	05	05	Pelaksanaan Penilaian AKJ Fungsional Penyuluh (AKJF)	Pelaksanaan penilaian AKJF/AKJF	153 orang	10 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	100,00%
1	21	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	21	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	2 jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100,00 %	4 Jenis	4 Jenis	100,00%
1	21	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	2 dok	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 dok	2 dok	100,00%
1	21	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	1 dok	1 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 dok	1 dok	100,00%
1	21	01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang berbasis kinerja	4 jenis	4 jenis	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
1	21	01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD	3 jenis	3 jenis	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
1	21	01	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	21	01	16	01	Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)	Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	840 KK	28 KK	12 Kelurahan	12 Kelurahan	100,00 %	12 Kelurahan	12 Kelurahan	100,00%
1	21	01	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Skor Pola pangan harapan (PPH)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



1	21	01	16	05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	-		-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100,00%
1	21	01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kelompok yang terpenuhi kecukupan pangan	38 P2KP	9 P2KP	9 KRPL	9 KRPL	100%	13 KRLP	13 KRLP	100,00%
1	21	01	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah komoditi pangan strategis	9 komoditi	9 komoditi	9 komoditi	9 komoditi	100%	9 komoditi	9 komoditi	100,00%
1	21	01	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	60 ton	5 ton	100 Ton	0 Ton	100%	100 ton	100 ton	100,00%
1	21	01	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah kelompok yang terpenuhi pangan	25 kelurahan	6 kelurahan	13 Kelompok	13 Kelompok	100%	13 Kelompok	13 Kelompok	100,00%
1	21	01	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terciptanya model distribusi pangan	15 LDPM	2 LDPM	8000 Rp	8000 Rp	100%	9000 Rp	9000 Rp	100,00%
1	21	01	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jenis buah dan sayur yang dianalisa	57 jenis	-	4 jenis	4 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100,00%
1	21	01	16	32	Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Prosentase masyarakat yang memahami pola konsumsi pangan B2SA di Kota Bima	15%	15%	15%	10%	100%	15%	15%	100,00%
1	21	01	16	33	Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	38 kelurahan	6 kelurahan	50 KK	50 KK	100%	150 KK	150 KK	100,00%
1	21	01	17		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatkan aksesibilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	21	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jenis produk unggulan daerah yang disebar/pamerkan	60 jenis	10 jenis	17 jenis	14 jenis	100%	17 jenis	17 jenis	100,00%



Rincian evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja
Renstra SKPD DKP Kota Bima sebagai berikut :

- a. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	WAJIB				
1 21	Ketahanan Pangan				
1 21 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
1 21 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	100,00 %
1 21 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	100,00 %
1 21 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	100,00 %
1 21 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	100,00 %
1 21 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	100,00 %
1 21 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	100,00 %
1 21 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	12 bln	12 bln	100,00 %
1 21 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	11 bln	11 bln	100,00 %
1 21 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %
1 21 01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %
1 21 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
1 21 01 02 02	Pembangunan rumah dinas	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	-	-	-
1 21 01 02 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Sarana perlengkapan kantor yang memadai	-	-	-
1 21 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	-	-	-
1 21 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	4 Jenis	4 Jenis	100,00 %
1 21 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	-	-	-



1	21	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	-	-	-
1	21	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %
1	21	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %
1	21	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	-	-	-
1	21	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %
1	21	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%
1	21	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas	-	-	-
1	21	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	100%
1	21	01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya SDM aparatur terhadap pemahaman peraturan perundangan	-	-	-
1	21	01	05	04	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-Undangan	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-
1	21	01	05	05	Pelaksanaan Penilaian AKJ Fungsional Penyuluh (AKJF)	Pelaksanaan penilaian AKJF/AKJF	25 orang	25 orang	100%
1	21	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	100%
1	21	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	4 Jenis	4 Jenis	100,00 %
1	21	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %
1	21	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %
1	21	01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang berbasis kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %
1	21	01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %
1	21	01	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEB UNA	Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas pangan	100 %	100 %	100%
1	21	01	16	01	Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)	Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	12 Kelurahan	12 Kelurahan	100,00 %
1	21	01	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Skor Pola pangan harapan (PPH)	100%	100%	100%



1	21	01	16	05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	-	-	-
1	21	01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kelompok yang terpenuhi kecukupan pangan	9 KRPL	9 KRPL	100%
1	21	01	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah komoditi pangan strategis	9 komoditi	9 komoditi	100%
1	21	01	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	100 Ton	0 Ton	100%
1	21	01	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah kelompok yang terpenuhi pangan	13 Kelompok	13 Kelompok	100%
1	21	01	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terciptanya model distribusi pangan	8000 Rp	8000 Rp	100%
1	21	01	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jenis buah dan sayur yang dianalisa	4 jenis	4 jenis	100%
1	21	01	16	32	Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Prosentase masyarakat yang memahami pola konsumsi pangan B2SA di Kota Bima	15%	10%	100%
1	21	01	16	33	Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	50 KK	50 KK	100%
1	21	01	17		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatkan aksesibilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100%	100%	100%
1	21	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jenis produk unggulan daerah yang disebar/pamerkan	17 jenis	14 jenis	100%

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Berdasarkan Realisasi program/kegiatan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan diatas memberikan dampak yang baik terhadap target capaian program Renstra SKPD sampai dengan periode Tahun 2019. Sedangkan untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap target capaian program Renstra SKPD sampai dengan periode Tahun 2019. Sehingga pada Rencana Kerja periode tahun 2019 akan ditingkatkan dengan harapan dapat mencapai target.

c. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang akan ditempuh untuk mengurangi faktor-faktor penyebab tersebut.

Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja tahun 2018 akan tetap dilaksanakan mengacu pada pelaksanaan kegiatan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja (tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017). Dengan harapan untuk Renja tahun 2018 tetap



memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sedangkan untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran akan dimenjadi catatan khusus agar pelaksanaannya dievaluasi secara berkala guna mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun capaian kinerja pelayanan SKPD DKP Kota Bima berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun indikator kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Kota Bima (Tabel 2.2) sebanyak 14 indikator kinerja pelayanan, dirinci sebagai berikut:

- Sebanyak 7 indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan;
Capaian kinerja untuk 7 indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan diperoleh 4 indikator kinerja yang telah memenuhi target, sedangkan 3 indikator lainnya belum memenuhi target.
- Tidak terdapat indikator IKK dan indikator lainnya.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%			90%	90%	90%	99,24%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
2	Penguatan cadangan pangan	60%			60%	60%	60%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%			90%	90%	90%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	90%			90%	90%	90%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%			90%	90%	90%	70,40%	70,80%	70,80%	70,80%	70,80%	
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%			60%	65%	70%	100,00 %	60,00%	70,00%	75,00%	75,00%	
7	Penanganan Daerah rawan pangan	60%			65%	70%	75%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kota Bima saat ini antara lain:

- Belum tersedianya cadangan pangan pemerintah (CPP) Kota.
- Rendahnya adopsi teknologi olahan pangan non beras dan terigu
- Masih terbatasnya lumbung pangan disentra produksi
- Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk lokal cenderung menurun

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, serta pencapaian SPM

Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan di Kota Bima pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi dan misi yang diusung oleh Walikota dan wakil walikota Bima yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

Adapun Visi Kota Bima tahun 2013-2018 sesuai Perda tersebut diatas adalah “Menuju Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa yang beriman, maju, adil dan sejahtera.”

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan lebih lanjut misi yang selanjutnya akan di Implementasikan setiap tahun. Misi yang akan dilaksanakan tahun 2013-1018 adalah :

1. Membentuk manusia yang Beriman melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan akidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal;
2. Menciptakan manasia yang Maju melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat yang Adil melalui pembangunan yang merata dengan masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima; dan

4. Menjadikan masyarakat sejahtera berbasis pembangunan ekonomi lokal dengan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai yang diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing ditingkat regional dan nasional.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dan memperhatikan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD DKP Kota Bima, maka akan berdampak cukup besar dalam pencapaian visi dan misi Kota Bima. hal ini terjadi karena sebagian besar masalah dan hambatan yang dihadapi. Tetapi dengan adanya visi dan misi kepala daerah tersebut, dapat membantu peran SKPD DKP Kota Bima agar pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi oleh DKP Kota Bima dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bima. Rencana tata ruang tersebut berakibat pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian beririgasi sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah potensi irigasi dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bima untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Sedangkan isu yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran sumber daya air dan masih terdapatnya lahan-lahan kritis di Kota Bima, disamping itu tumbuhnya permukiman penduduk dengan semua aktifitasnya pada bantaran sungai/anak sungai, sempadan irigasi dan sekitar saluran drainase berdampak pada terganggunya fungsi sarana-prasarana pertanian.

4. Formulasi isu-isu penting

- a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima tahun 2013 sebanyak 148.645 jiwa (www.bimakota.bps.go.id, 2016) meningkat menjadi 156.400 jiwa pada tahun 2014, naik sebesar 5,22% (7.755 jiwa). Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah Kota Bima khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumber daya lahan pertanian sebagai “pabrik” bahan pangan luasnya terus berkurang akibat tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan disektor lainnya.



Berdasarkan data hasil kegiatan pemetaan lahan pertanian sawah irigasi dan sawah non irigasi tahun 2014 seluas 1.377,16 ha. Data luas sawah ini berkurang dari tahun sebelumnya, tetapi masalah yang kemudian timbul adalah terjadinya pembukaan lahan pertanian di daerah tegalan (pegunungan) untuk memebuhi ketersediaan lahan yang semakin berkurang serta kebutuhan pangan yang semakin meningkat).

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima selama 3 tahun terakhir sebesar 1,40% per tahun juga dapat di artikan dengan makin bertambahnya penduduk Kota Bima kurang lebih 2.081 jiwa setiap tahunnya, jumlah ini setara dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi beras sebesar 264 ton per tahunnya.

b. Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2013, dari 38 jumlah Kelurahan di Kota Bima terdapat 12 Kelurahan yang tergolong rentan pangan dengan kategori sebagai berikut :

1. Prioritas 1 yang mendapatkan penanganan terdapat 3 (tiga) Kelurahan yaitu Matakando, Panggi dan Kelurahan Mande. 3 Kelurahan memiliki tingkat resiko kerentanan pangan yang tinggi memerlukan prioritas untuk di tangani dengan indikator yang berpengaruh yaitu kurangnya sarana kesehatan, kurangnya tersebar toko-toko yang menjual bahan pangan dan rendahnya derajat kesehatan balita.
2. Prioritas 2 yang mendapatkan penanganan adalah 3 (tiga) Kelurahan yaitu Dara, Jatiwangi dan kelurahan Jatibaru.
3. Prioritas 3 sebanyak 6 (enam) Kelurahan untuk ditangani yaitu Oi Fo'o, Lelamase, Ntobo, Nungga, Kumbe dan Kelurahan Melayu.

disemprot pestisida, terdapat kelainan genetik yang berpotensi menyebabkan bayi tersebut cacat tubuh sekaligus cacat mental.

Pestisida masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara sedikit demi sedikit dan mengakibatkan keracunan kronis. Bisa pula berakibat racun akut bila jumlah pestisida yang masuk ke tubuh manusia dalam jumlah yang cukup (Wudianto R, 2011).

1. Keracunan Kronis

Pemaparan kadar rendah dalam jangka panjang atau pemaparan dalam waktu yang singkat dengan akibat kronis. Keracunan kronis dapat ditemukan dalam bentuk kelainan syaraf dan perilaku (bersifat neuro toksik) atau mutagenitas. Selain itu ada beberapa dampak kronis keracunan pestisida, antara lain:

a. Pada syaraf

Gangguan otak dan syaraf yang paling sering terjadi akibat terpapar pestisida selama bertahun-tahun adalah masalah pada ingatan, sulit berkonsentrasi, perubahan kepribadian, kelumpuhan, bahkan kehilangan kesadaran dan koma.

b. Pada Hati (Liver)

Hati adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menetralkan bahan-bahan kimia beracun, maka hati itu sendiri sering kali dirusak oleh pestisida apabila terpapar selama bertahun-tahun. Hal ini dapat menyebabkan Hepatitis

c. Pada Perut

Muntah-muntah, sakit perut dan diare adalah gejala umum dari keracunan pestisida. Banyak orang-orang yang dalam pekerjaannya berhubungan langsung dengan pestisida selama bertahun-tahun, mengalami masalah sulit makan. Orang yang menelan pestisida (baik sengaja atau tidak) efeknya sangat buruk pada perut dan tubuh secara umum. Pestisida merusak langsung melalui dinding-dinding perut.

d. Pada Sistem Kekebalan

Beberapa jenis pestisida telah diketahui dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara yang lebih berbahaya. Beberapa jenis pestisida dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk menahan dan melawan infeksi. Ini berarti tubuh menjadi lebih mudah terkena infeksi,

atau jika telah terjadi infeksi penyakit ini menjadi lebih serius dan makin sulit untuk disembuhkan.

e. Pada Sistem Hormon.

Hormon adalah bahan kimia yang diproduksi oleh organ-organ seperti otak, tiroid, paratiroid, ginjal, adrenalin, testis dan ovarium untuk mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang penting. Beberapa pestisida mempengaruhi hormon reproduksi yang dapat menyebabkan penurunan produksi sperma pada pria atau pertumbuhan telur yang tidak normal pada wanita. Beberapa pestisida dapat menyebabkan pelebaran tiroid yang akhirnya dapat berlanjut menjadi kanker tiroid.

2. Keracunan Akut.

Keracunan akut terjadi apabila efek keracunan pestisida langsung pada saat dilakukan aplikasi atau seketika setelah aplikasi pestisida.

a. Efek akut lokal.

Bila efeknya hanya mempengaruhi bagian tubuh yang terkena kontak langsung dengan pestisida biasanya bersifat iritasi mata, hidung, tenggorokan dan kulit.

b. Efek akut sistemik.

Terjadi apabila pestisida masuk kedalam tubuh manusia dan mengganggu sistem tubuh. Darah akan membawa pestisida keseluruh bagian tubuh menyebabkan bergeraknya syaraf-syaraf otot secara tidak sadar dengan gerakan halus maupun kasar dan pengeluaran air mata serta pengeluaran air ludah secara berlebihan, pernafasan menjadi lemah/cepat (tidak normal).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target



sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Sehubungan tidak ada rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang disampaikan ke SKPD, maka SKPD Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun 2018 mengajukan Rumusan untuk Renja-SKPD 2017 sebagai mana yang tertuang pada program dan kegiatan sesuai (Tabel 2.3 dan Tabel 2.4):



Tabel 2.3
Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2017
Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kota Bima

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	666.706.600
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	77.900.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	38.400.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	16.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	44.388.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	40.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	65.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	4 Jenis	62.580.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	11 Bulan	34.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	261.938.600
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Ibukota Negara, Ibukota Provinsi NTB dan kota-kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	25.000.000
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	120.990.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Bima	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	3 Jenis	30.990.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bima	Tersedianya Sarana perlengkapan kantor yang memadai	1 Tahun	30.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Kota Bima	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	1 Tahun	30.000.000
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	25.000.000
	Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan	Kota Bima	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas	38Orang	25.000.000



05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu	100%	12.950.000
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Meningkatnya SDM aparatur terhadap pemahaman peraturan perundangan	25 Orang	12.950.000
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	149.500.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	3 Jenis	24.000.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	2 Dokumen	15.750.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	1Dokumen	15.750.000
	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA SKPD	Kota Bima	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang berbasis kinerja	4 Dokumen	40.000.000
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD	3 Dokumen	54.000.000
07	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas pangan	100%	783.865.400
	Penanganan daerah rawan pangan	Kota Bima	Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	12 Keluhan	76.565.000
	Penyusunan data base potensi produk pangan	kota Bima	Jumlah prodak pangan	12 Keluhan	26.175.000
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Kota Bima	Skor Pola pangan harapan (PPH)	80 Persen	25.410.400
	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Kota Bima	Jumlah prodak pangan	2 Jenis	26.750.000
	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang terpenuhi kecukupan pangan	13 KRPL	75.195.000
	Pengembangan Sistim Informasi Pasar	Kota Bima	Jumlah komoditi pangan	9 Komoditi	37.600.000
	Pengembangan cadangan pangan daerah	Kota Bima	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	100 ton	53.790.000
	Pengembangan Desa mandiri pangan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang terpenuhi pangan	13 Kelompok	64.540.000
	Pengembangan lumbung pangan	Kota bima	Harga pangan pokok yang stabil	1 Kelompok	24.300.000
	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Kota Bima	Terciptanya model distribusi pangan	9.000 Rupiah	40.950.000
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Kota Bima	Jenis buah dan sayur yang dianalisa	4 Jenis	51.275.000
	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Kota Bima	Pemanfaatan makanan alternatif	5 Kelurahan	23.675.000



	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kota Bima	Prosentase masyarakat yang memahami pola konsumsi pangan B2SA di Kota Bima	15 Persen	165.000.000
	Pelaksanaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Kota Bima, Provnsi & Nasional	Jumlah Kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	150 KK	44.950.000
08	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN		Meningkatkan aksesibilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100%	92.650.000
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Kota Bima, Provnsi & Nasional	Jenis produk unggulan daerah yang disebarakan/pamerkan	17 Jenis	92.650.000



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKP tahun 2017
Kota Bima

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(12)
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pelayanan administrasi perkantoran			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Bima	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		666.706.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	77.900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	38.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	16.500.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	44.388.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	65.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	4 Jenis		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	4 Jenis	62.580.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	11 Bulan		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	11 Bulan	34.000.000	



	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bima	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	261.938.600	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Ibukota Negara, Ibukota Provinsi NTB dan kota-kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Ibukota Negara, Ibukota Provinsi NTB dan kota-kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	1 Tahun	25.000.000	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				120.990.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Bima	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	3 Jenis		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Bima	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	3 Jenis	30.990.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bima	Tersedianya Sarana perlengkapan kantor yang memadai	1 Tahun		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bima	Tersedianya Sarana perlengkapan kantor yang memadai	1 Tahun	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Kota Bima	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	1 Tahun		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Kota Bima	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	1 Tahun	30.000.000	
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				25.000.000	
	Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan	Kota Bima	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas	38Orang		Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan	Kota Bima	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas	38Orang	25.000.000	
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				12.950.000	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Meningkatnya SDM aparatur terhadap pemahaman peraturan perundangan	25 Orang		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Meningkatnya SDM aparatur terhadap pemahaman peraturan perundangan	25 Orang	12.950.000	
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				149.500.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	3 Jenis		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	3 Jenis	24.000.000	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	2 Dokumen		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	2 Dokumen	15.750.000	



	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	1Dokumen		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	1Dokumen	15.750.000	
	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA SKPD	Kota Bima	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang berbasis kinerja	4 Dokumen		Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA SKPD	Kota Bima	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang berbasis kinerja	4 Dokumen	40.000.000	
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD	3 Dokumen		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD	3 Dokumen	54.000.000	
07	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN		Meningkatkan kualitas dan kapasitas pangan	100%		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN		Meningkatkan kualitas dan kapasitas pangan	100%	783.865.400	
	Penanganan daerah rawan pangan	Kota Bima	Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	12 Keluhan		Penanganan daerah rawan pangan	Kota Bima	Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	12 Keluhan	76.565.000	
	Penyusunan data base potensi produk pangan	kota Bima	Jumlah prodak pangan	12 Keluhan		Penyusunan data base potensi produk pangan	kota Bima		12 Keluhan	26.175.000	
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Kota Bima	Skor Pola pangan harapan (PPH)	80 Persen		Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Kota Bima	Skor Pola pangan harapan (PPH)	80 Persen	25.410.400	
	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Kota Bima		2 Jenis		Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Kota Bima		2 Jenis	26.750.000	
	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang terpenuhi kecukupan pangan	13 KRPL		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang terpenuhi kecukupan pangan	13 KRPL	75.195.000	
	Pengembangan Sistik Informasi Pasar	Kota Bima	Jumlah komoditi pangan	9 Komoditi		Pengembangan Sistik Informasi Pasar	Kota Bima	Jumlah komoditi pangan	9 Komoditi	37.600.000	
	Pengembangan cadangan pangan daerah	Kota Bima	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	100 ton		Pengembangan cadangan pangan daerah	Kota Bima	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	100 ton	53.790.000	
	Pengembangan Desa mandiri pangan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang terpenuhi pangan	13 Kelompok		Pengembangan Desa mandiri pangan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang terpenuhi pangan	13 Kelompok	64.540.000	
	Pengembangan lumbung pangan	Kota bima	Harga pangan pokok yang stabil	1 Kelompok		Pengembangan lumbung pangan	Kota bima	Harga pangan pokok yang stabil	1 Kelompok	24.300.000	
	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Kota Bima	Terciptanya model distribusi pangan	9.000 Rupiah		Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Kota Bima	Terciptanya model distribusi pangan	9.000 Rupiah	40.950.000	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Kota Bima	Jenis buah dan sayur yang dianalisa	4 Jenis		Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Kota Bima	Jenis buah dan sayur yang dianalisa	4 Jenis	51.275.000	
	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Kota Bima	Pemanfaatan makanan alternatif	5 Kelurahan		Penyuluhan sumber pangan alternatif	Kota Bima	Pemanfaatan makanan alternatif	5 Kelurahan	23.675.000	



	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kota Bima	Prosentase masyarakat yang memahami pola konsumsi pangan B2SA di Kota Bima	15 Persen		Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kota Bima	Prosentase masyarakat yang memahami pola konsumsi pangan B2SA di Kota Bima	15 Persen	165.000.000	
	Pelaksanaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Kota Bima, Provnsi & Nasional	Jumlah kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	150 KK		Pelaksanaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Kota Bima, Provnsi & Nasional	Jumlah kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	150 KK	44.950.000	
08	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN		Meningkatkan aksesibilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN		Meningkatkan aksesibilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		92.650.000	
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Kota Bima, Provnsi & Nasional	Jenis produk unggulan daerah yang disebarakan/pamerkan	17 Jenis		Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Kota Bima, Provnsi & Nasional	Jenis produk unggulan daerah yang disebarakan/pamerkan	17 Jenis	92.650.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi.

Untuk SKPD DKP Kota Bima belum mendapat usulan dari para pemangku kepentingan sehingga belum melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terhadap usulantersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional di bidang ketahanan pangan yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan dengan arah kebijakan umum ketahanan pangan adalah: (i) pematapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) stabilisasi harga bahan pangan; (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Kebijakan Provinsi NTB tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018 adalah peningkatan produksi pertanian melalui program unggulan Pijar (Sapi, jagung dan rumput laut).

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kota Bima

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1	Peningkatan Kedaulatan Pangan	RPJMN 2015 - 2019	
B	Provinsi		
1	Peningkatan produksi pertanian	RPJMD Provinsi NTB 2013 - 2018	

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam pelaksanaan RENJA tahun 2018 ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. Meningkatkan distribusi dan akses pangan;
- c. Meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan;
- d. Mewujudkan penanganan kerawanan pangan;



Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Bima dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah :

- a. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. Meningkatnya distribusi dan akses pangan;
- c. Meningkatnya penganekaragaman dan keamanan pangan;
- d. Terwujudnya penanganan kerawanan pangan;

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan (tahun 2017) adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan



4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan Rencana Kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - e. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - a. Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)
 - b. Penyusunan data base potensi produk pangan
 - c. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 - d. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
 - e. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
 - f. Pengembangan Sistim Informasi Pasar
 - g. Pengembangan cadangan pangan daerah
 - h. Pengembangan Desa mandiri pangan
 - i. Pengembangan lumbung pangan
 - j. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
 - k. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - l. Penyuluhan sumber pangan alternatif
 - m. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
 - n. Pelaksanaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Bima

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Jumlah Pendanaan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
					APBD Kota Bima	APBD Provinsi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	WAJIB											
1	Ketahanan Pangan											
1	21	1.21.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bima	100%	666.706.600	0	666.706.600		733.377.260
1	21	1.21.01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	77.900.000	0	77.900.000		85.690.000
1	21	1.21.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	38.400.000	0	38.400.000		42.240.000
1	21	1.21.01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	16.500.000	0	16.500.000		18.150.000
1	21	1.21.01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	44.388.000	0	44.388.000		48.826.800
1	21	1.21.01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	40.000.000	0	40.000.000		44.000.000



1	21	1.21.01		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	65.000.000	0	65.000.000			71.500.000
1	21	1.21.01		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	4 Jenis	62.580.000	0	62.580.000			68.838.000
1	21	1.21.01		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	11 Bulan	34.000.000	0	34.000.000			37.400.000
1	21	1.21.01		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	261.938.600	0	261.938.600			288.132.460
1	21	1.21.01		19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi yang optimal	Kota Bima	1 Tahun	25.000.000	0	25.000.000			27.500.000
1	21	1.21.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Kota Bima	100%	120.990.000	0	120.990.000			135.245.000
1	21	1.21.01		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	Kota Bima	3 Jenis	30.990.000	0	30.990.000			0
1	21	1.21.01		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana perlengkapan kantor yang memadai	Kota Bima	1 Tahun	30.000.000	0	30.000.000			33.000.000
1	21	1.21.01		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana peralatan kantor yang memadai	Kota Bima	1 Tahun	30.000.000	0	30.000.000			33.000.000
1	21	1.21.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Kota Bima	100%	25.000.000	0	25.000.000			27.500.000
1	21	1.21.01		02	Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas	Kota Bima	38Orang	25.000.000	0	25.000.000			27.500.000
1	21	1.21.01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pengelolaan kepegawain yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Bima	100%	12.950.000	0	12.950.000			14.245.000
1	21	1.21.01		02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya SDM aparatur terhadap pemahaman peraturan perundangan	Kota Bima	25 Orang	12.950.000	0	12.950.000			164.450.000



1	21	1.21.01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	Kota Bima	100%	149.500.000	0	149.500.000		164.450.000
1	21	1.21.01	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	Kota Bima	3 Jenis	24.000.000	0	24.000.000		26.400.000
1	21	1.21.01	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	Kota Bima	2 Dokumen	15.750.000	0	15.750.000		17.325.000
1	21	1.21.01	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel	Kota Bima	1Dokumen	15.750.000	0	15.750.000		17.325.000
1	21	1.21.01	05	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang berbasis kinerja	Kota Bima	4 Dokumen	40.000.000	0	40.000.000		44.000.000
1	21	1.21.01	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD	Kota Bima	3 Dokumen	54.000.000	0	54.000.000		59.400.000
1	21	1.21.01	07	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pangan	Kota Bima	100%	783.865.400	0	783.865.400		862.251.940
1	21	1.21.01	01	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	Kota Bima	12 Keluhan	76.565.000	0	76.565.000		84.221.500
1	21	1.21.01	02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah prodak pangan	Kota Bima	12 Keluhan	26.175.000	0	26.175.000		28.792.500
1	21	1.21.01	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Skor Pola pangan harapan (PPH)	Kota Bima	80 Persen	25.410.400	0	25.410.400		27.951.440
1	21	1.21.01	05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Kota Bima	2 Jenis	26.750.000	0	26.750.000		29.425.000
1	21	1.21.01	09	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Jumlah kelompok yang terpenuhi kecukupan pangan	Kota Bima	13 KRPL	75.195.000	-	75.195.000		171.523.000
1	21	1.21.01	11	Pengembangan Sistim Informasi Pasar	Jumlah komoditi pangan	Kota Bima	9 Komoditi	37.600.000	0	37.600.000		41.360.000
1	21	1.21.01	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Kota Bima	100 ton	53.790.000	-	53.790.000		59.169.000
1	21	1.21.01	14	Pengembangan Desa mandiri pangan	Jumlah kelompok yang terpenuhi pangan	Kota Bima	13 Kelompok	64.540.000	-	64.540.000		70.994.000



1	21	1.21.01		16	Pengembangan Diversifikasi tanaman	Terciptanya lahan divertifikasi	Kota Bima	2	47.690.000	0	47.690.000			588.995.000
1	21	1.21.01		18	Pengembangan lumbung pangan	Harga pangan pokok yang stabil	Kota Bima	1 Kelompok	24.300.000	0	24.300.000			26.730.000
1	21	1.21.01		19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terciptanya model distribusi pangan	Kota Bima	9.000 Rupiah	40.950.000	0	40.950.000			45.045.000
1	21	1.21.01		22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jenis buah dan sayur yang dianalisa	Kota Bima	4 Jenis	51.275.000	0	51.275.000			56.402.500
1	21	1.21.01		30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Pemanfaatan makanan alternatif	Kota Bima	5 Kelurahan	23.675.000	0	23.675.000			26.042.500
1	21	1.21.01		32	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prosentase masyarakat yang memahami pola konsumsi pangan B2SA di Kota Bima	Kota Bima	15 Persen	165.000.000	0	165.000.000			181.500.000
1	21	1.21.01		33	Pelaksanaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	Kota Bima	150 KK	44.950.000	0	44.950.000			49.445.000
1	21	1.21.01	08		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Meningkatkan aksesibilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kota Bima	100%	92.650.000	0	92.650.000			101.915.000
1	21	1.21.01		07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Jenis produk unggulan daerah yang disebarkan/pamerkan	Kota Bima	12 jenis	92.650.000	0	92.650.000			101.915.000
JUMLAH									1.851.662.000	-	1.851.662.000			2.038.984.200



BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) adalah merupakan penjabaran Rencana Strategi Pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan Kota Bima selama 5 (lima) tahun (2013-2018) sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahunan. Agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan akuntabel, diharapkan kerjasama dan kerja keras aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mulai dari proses perencanaan program dan kegiatan sampai pada tahap implementasinya. Selain itu, juga sangat diharapkan masukan yang bersifat membangun agar pada penyusunan RENJA tahun berikutnya dapat disempurnakan lagi.

Raba – Bima, Februari 2018

Kepala Dinas,

Ir. Syamsudin

NIP. 19620103 199203 1 006

